



<http://jm.ejournal.id>

**MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran**

ISSN (Print): 2443-1435 || ISSN (Online): 2528-4290



## Implementasi Nilai Musyawarah Pada Pancasila Melalui Metode Diskusi Kelas Dalam Mata Kuliah PKn

Suhartono<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received 10.12.2020

Received in revised form  
20.01.2021

Accepted 17.02.2021

Available online  
01.04.2021

### ABSTRACT

Pancasila is the way of life of the Indonesian nation, consisting of five principles that have interrelated values. The values of deliberation are the values of Pancasila contained in the fourth precept, as a guideline for decision making according to the values of Pancasila. The discussion method is one of the methods that lecturers can use to familiarize students with learning to express opinions in lectures. The purpose of this study was to determine the values of deliberation contained in Pancasila, especially the fourth precept, which can be implemented in the lecture discussion method. In addition, another objective of this study is to know how to implement the deliberation values found in Pancasila, especially the fourth precept, and to find out the obstacles to implementing the deliberation values found in Pancasila, especially the fourth precept. Data collection techniques in this study are interview techniques, observation, questionnaires, and documentation (discussion activities). Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validity technique used triangulation technique (technique, source, and time). The results that can be explained in this study are the values of deliberation that can be implemented in the practice of recovery discussions, namely: a family spirit, based on a sense of responsibility, prioritizing public interests, not imposing wills, paying attention to regulations, being accountable to God Almighty. As for the implementation steps, namely, dividing the executive duties, responding to the source of the problem, selecting the source of the problem, students responding, concluding. Barriers to implementation are passive students, students impose their will, students stand out, students emphasize personal interests. Conclusions and suggestions that can be written by researchers so that this research is especially useful for students to better understand the Civics subject matter, and understand the values of Pancasila in practice discussions.

#### Keywords:

*Pancasila, Value of Deliberation, Class Discussion Method*

DOI 10.30653/003.202171.151



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. © 2020.

### PENDAHULUAN

Dalam Pelaksanaan bernegara, setiap negara memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dilihat dari sisi pelaksanaannya bentuk pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk diantaranya; Oligarki, Monarki, dan Demokrasi (Rahayu 2006). Beberapa bentuk pemerintahan tersebut tentunya memiliki ciri dan keunggulan tersendiri oleh masyarakat sehingga menjadi pembeda dari ketiga bentuk negara tersebut, seperti halnya bentuk negara oligarki memiliki ciri bahwa bentuk negara tersebut dijalankan dari beberapa pihak yang berkuasa, bentuk monarki memiliki ciri bahwa itu merupakan bentuk negara kerajaan, sedangkan Demokrasi memiliki ciri bahwa dalam sebuah negara kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai penguasa. Perlu diketahui juga bahwa suatu negara juga menerapkan beberapa sistem pemerintahan.

<sup>1</sup>Corresponding author's address: Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.  
e-mail: [suhartono@unipasby.ac.id](mailto:suhartono@unipasby.ac.id)

Sistem pemerintahan dalam suatu negara juga beragam, diantara sistem pemerintahan itu ialah; sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan referendum, ada juga sistem pemerintahan campuran (Anangkota: 2017; Fanny, 2019). Beberapa sistem pemerintahan yang sudah disebutkan diatas juga memiliki beberapa ciri masing-masing, sehingga dengan ciri tersebut masyarakat bisa membedakannya.

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan negara lainnya, keanekaragaman masyarakat, suku, ras, Bahasa dan budaya yang ada didalamnya menjadi salah satu cirinya (Rahayu:2017). Teritorial negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan dipisahkan oleh teluk, selat dan laut memberikan pengaruh perbedaan didalamnya. Walaupun demikian toleransi kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia bisa terjaga dengan baik, ini dikarenakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia masyarakat sudah diikat dalam suatu ikatan Ideologi yang satu yang disebut Pancasila, selain itu dalam masyarakat Indonesia tumbuh dan tertanam semboyan kebersamaan "Bhineka Tunggal Ika" yang mempunyai arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu Jua (Indonesia). Dari sistem pemerintahan negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Demokrasi, sistem pemerintahan yang identik dengan kekuasaan berada ditangan rakyat, sehingga diharapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan bersama bisa dilaksanakan dengan jalan Musyawarah dalam mencapai kata mufakaat.

Musyawarah dalam mencapai kata mufakaat merupakan kebiasaan yang sudah membudaya dari jaman nenek moyang (zaman kerajaan), ini sekaligus menjadi ciri masyarakat Indonesia dengan Masyarakat negara-negara lainnya. Pendiri bangsa juga menyadari bahwa ditengah keberagaman yang mewarnai kultur Indonesia, maka dengan musyawarahlah merupakan jalan yang baik dalam memecahkan suatu permasalahan. Begitu pentingnya nilai musyawarah bagi bangsa Indonesia sehingga nilai tersebut dijadikan sebagai salah satu muatan nilai/sila dasar negara Indonesia (Pancasila),tertuang dalam sila ke empat "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan", sehingga diharapkan dengan nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah bersama di negara Indonesia (Kansil: 2011). Musyawarah dirasa sangat pas bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam budaya, ras, agama, karena dianggap dapat menyalurkan segala aspirasi yang ada.

Musyawarah bisa dikatakan merupakan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun demikian budaya tersebut semakin lama sudah semakin dikesampingkan oleh masyarakat di Indonesia. Masyarakat saat ini kurang memahami tujuan dilaksanakan suatu musyawarah agar mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan bersama ataupun dalam penyelesaian masalah bersama (Rahayu: 2017). Kenyataan dalam masyarakat saat ini, penyelesaian masalah yang muncul dalam masyarakat lebih sering dilakukan dengan jalan "voting" mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Tindakan mengesampingkan budaya musyawarah ternyata tidak hanya terjadi ditataran masyarakat Indonesia saja, namun kenyataannya juga terjadi pada tataran pemerintahan (Detiknews: 2017). Pemerintah yang seharusnya menjadi contoh masyarakat justru lebih sering melakukan "voting" dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan kenegaraan. Wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat (melalui pemilu, mereka dalam pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan sudah jarang mengedepankan musyawarah namun lebih sering melakukan "voting" berdasarkan suara terbanyak.

Agenda rapat oleh para wakil rakyat memiliki pengistilahan rapat yang bertujuan untuk mencari keputusan berdasarkan mufakat (Yuwanto: 2016). Kenyataannya dalam pelaksanaan rapat-rapat DPR sering diterapkan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting), meskipun juga terkadang dalam rapat diterapkan secara musyawarah untuk mufakat namun pelaksanaan

nilai-nilai musyawarah kurang begitu baik. Rapat yang dilakukan kadang kala menyimpang tidak sesuai dengan nilai-nilai musyawarah yang seharusnya.

Perilaku menyimpang terhadap nilai-nilai Musyawarah dalam rapat sering diperlihatkan, seperti pada saat rapat paripurna mengenai hak angket KPK yang berakhir dengan ricuh disertai dengan beberapa tindakan walk out sebagian anggota dewan dari beberapa fraksi yang tidak sependapat dengan keputusan Ketua rapat (Kompas: 2017). Semua itu merupakan contoh salah satu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam pelaksanaan musyawarah.

Musyawarah tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga terdapat tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku yang kurang sesuai dengan nilai-nilai pelaksanaan musyawarah oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini memerlukan perhatian dan pembenahan kita semua agar dapat terjadi suatu perubahan dalam pelaksanaan musyawarah, terutama memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hakikat dan pentingnya nilai-nilai musyawarah dalam rangka menyelesaikan masalah bersama. Tidakan pemahaman ini bisa dilakukan melalui bidang pendidikan atau proses perkuliahan di perguruan Tinggi, karena dari bidang inilah pemuda para penerus bangsa bisa memahami hakikat dan pentingnya nilai musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Implementasi penerapan nilai-nilai musyawarah yang baik dapat praktikkan melalui metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar dalam proses pembelajaran, seperti penerapan metode diskusi kelas dalam kegiatan pembelajaran (Majid: 2014).

Setiap pengajar akan mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam rangka mempersiapkan proses pembelajaran kepada peserta didiknya, diantaranya perangkat pembelajaran, media bahkan sudah merancang strategi dan metode pengajarannya. Hal ini tentu sangat sambung dengan upaya pemerintah yang telah merealisasikan kurikulum 2013, dengan ciri proses pembelajaran yang berorientasikan pada peserta didik diantaranya aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, dan berpusat pada siswa.

Diantara sekian banyak metode yang dapat dipakai oleh pengajar dalam proses pembelajaran, Metode diskusi kelas adalah salah satu metode pembelajaran yang cocok diterapkan dalam rangka pengajaran nilai-nilai musyawarah para peserta didik. Kegiatan pengimplementasian nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi kelas sangat sesuai apabila diterapkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian deskriptif. (Sugiyono: 2015) Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan angket serta didukung dengan dokumentasi berupa foto-foto (Arikunto: 2013). Data dalam penelitian ini berupa nilai musyawarah pada Pancasila yang dapat diimplementasikan forum diskusi, berhubung pandemi Covid-19 sehingga pengambilan data dilakukan secara online.

Data tentang cara pengimplementasian nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi kelas perkuliahan, dan mencari persoalan-persoalan yang menjadi hambatan-hambatan yang ada pada implementasi nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi kelas perkuliahan. Data-data tersebut diperoleh dari sumber data diantaranya: Ketua Kelas, Ketua masing-masing Kelompok, dan dan Mahasiswa Program studi Farmasi Angkatan 2019 kelas A dan B. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah mengadopsi teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, antaralain: Data Reduction (Penyederhanaan data), paparan dan Penyajian Data (*Display Data*), Tahap menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*). Adapun untuk teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, diantaranya: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono: 2015).

## DISKUSI

Teknik pemaparan data pada Penelitian ini menggunakan data deskripsi kualitatif, data-data yang telah dikumpulkan dari sumber data disajikan dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya data yang hasil data yang diperoleh disajikan sebagai berikut :

### **Nilai Musyawarah yang terdapat pada Pancasila Dapat Diimplementasikan Melalui Metode Diskusi**

Untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai implementasi nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data: a) Teknik wawancara Ketua kelas. b) teknik angket pada Ketua kelompok. Hasil bahwa nilai musyawarah pada Pancasila yang dapat diimplementasikan dari kedua teknik yang sudah diberikan kepada sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa cenderung lebih mendahulukan kepentingan kelompok dari pada Individu.
- b. Tidak ada individu yang memaksakan kehendaknya kepada Anggota diskusi yang lain.
- c. Terciptanya suasana kekeluargaan dalam berjalannya diskusi.
- d. Adanya rasa tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.
- e. Dalam penyampaian pendapat peserta diskusi memahami aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya.
- f. Seluruh pendapat dan keputusan dalam diskusi harus di pertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Suyahmo: 2015).

### **Teknik/Cara Implementasi Nilai Musyawarah pada Pancasila Melalui Metode Diskusi**

Dari penejlasan sebelumnya kita telah mengetahui nilai-nilai musyawarah yang diperoleh dari implementasi melalui metode diskusi, selanjutnya peneliti memaparkan data berkaitan dengan teknik/cara implementasi nilai musyawarah yang dapat dilaksanakan melalui metode diskusi pada sumber-sumber data. Tiga teknik dan tiga sumber data untuk mengetahui cara pengimplementasian nilai musawarah yang dilakukan dalam metode diskusi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 1) Teknik observasi, digunakan peneliti pada sumber data ketu kelompok diskusi melalui observasi. 2) Teknik Angket digunakan oleh peneliti pada sumber data Mahasiswa untuk mengetahui keberhasilan implementasi nilai musyawarah dalam diskusi, 3) Teknik wawancara juga digunakan pada sumber data Rusita (perwakilan mahasiswa Farmasi kelasA) untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pengimplementasian nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi. Beberapa kegiatan pengumpulan data tersebut telah dilakukan Peneliti, Adapun hasil sebagai berikut :

- a. Sebelum diskusi dilaksanakan, terlebih dahulu dalam sebuah kelompok ada pembagian tugas setiap Anggota, seperti tugas moderator, pemateri dan notulen/notulis.
- b. Sumber masalah yang bisa dikerjakan secara kelompok. Metode diskusi ini sumber masalah disajikan dosen, selanjutnya setiap kelompok memilih.
- c. Mahasiswa yang tampil, dan menanggapi pendapat peserta lain dalam diskusi.
- d. Penguatan dari Dosen.
- e. Secara kelompok bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi (Mulyono: 2012).

### **Hambatan yang ditemui dalam Pengimplementasian Nilai Musyawarah pada Pancasila Melalui Metode Diskusi**

Implementasi nilai-nilai musyawarah pada Pancasila yang dapat dilakukan melalui metode diskusi dalam perkuliahan PKn tentu saja memiliki beberapa hambatan. Mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai musyawarah pada Pancasila melalui metode diskusi dalam perkuliahan PKn, dalam hal ini peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data dan dua sumber data sebagai berikut : 1) Ketua kelas Farmasi 2019. 2) Ketua Masing-masing kelompok. Dari kedua sumber dapat diperoleh data sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang menonjol lebih dominan dalam berdiskusi.
- b. Masih banyak Mahasiswa yang kurang aktif dalam diskusi.
- c. Ditemukan juga beberapa Mahasiswa yang masih memaksakan pendapatnya paling benar.
- d. Mahasiswa masih egois (Simbolon: 2014)

## **SIMPULAN**

Berdasar penjelasan yang sudah Peneliti paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan di akhir Penelitian ini bahwa ada enam nilai musyawarah yang dapat diimplementasikan dalam praktik diskusi kelompok, ada lima cara yang dapat dipakai dalam pengimplementasian nilai-nilai musyawarah dalam praktik diskusi kelompok pada matakuliah PKn, Sedangkan ada empat hambatan-hambatan dalam praktik diskusi pengimplementasian nilai musyawarah pada Pancasila. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

### **Nilai Musyawarah yang terdapat pada Pancasila Dapat Diimplementasikan Melalui Metode Diskusi**

- a. Memprioritaskan kepentingan umum dalam musyawarah.
- b. Tidak ada paksaan dalam menyampaikan pendapat saat diskusi.
- c. Dalam bermusyawarah terjalin rasa kekeluargaan.
- d. Terlihat rasa tanggung jawab dari peserta saat menyampaikan pendapat.
- e. Aturan-aturan yang ada dalam musyawarah dipatuhi sebagian besar Mahasiswa dalam proses diskusi.
- f. Segala pendapat dan keputusan musyawarah dapat di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Suyahmo: 2015)

### **Teknik/Cara Implementasi Nilai Musyawarah pada Pancasila Melalui Metode Diskusi**

- a. Terdapat pembagian tugas dalam pelaksana dalam diskusi seperti moderator, narasumber, dan notulen/notulis.
- b. Sumber masalah yang bisa dikerjakan secara kelompok. Metode diskusi ini sumber masalah disajikan dosen, selanjutnya setiap kelompok memilih.
- c. Mahasiswa yang tampil, dan menanggapi pendapat peserta lain dalam diskusi.
- d. Penguatan dari Dosen.
- e. Secara kelompok bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi (Mulyono: 2012).

### **Hambatan yang ditemui dalam Pengimplementasian Nilai Musyawarah pada Pancasila Melalui Metode Diskusi**

- a. Mahasiswa yang menonjol lebih dominan dalam berdiskusi.
- b. Masih banyak Mahasiswa yang kurang aktif dalam diskusi.
- c. Ditemukan juga beberapa Mahasiswa yang masih memaksakan pendapatnya paling benar.
- d. Mahasiswa masih egois (Simbolon: 2014)

## **REFERENSI**

- Anangkota. M. (2017). Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No.2*. Diakses pada 07 Januari 2019. [jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/14725/7020](http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/14725/7020)
- Suharsimi, A. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Detiknews. 30 September 2017. "Masyarakat RI Dinilai Menjauh dari Musyawarah Mufakat". Jakarta. Diakses pada 29 Januari 2019. <https://www.detik.com/tag/musyawah>

- Fanny, A. M. (2019). Analysis Of Pedagogical Skills And Readiness Of Elementary School Teachers In Support Of The Implementation Of The 2013 Curriculum. *In International Conference on Bussiness Law and Pedagogy* (Vol. 1, No. 1, pp. 59-63).
- Kansil. (2011). *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : P.T. Rineka Cipta
- Kemendikbud. (2019). *Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jendral Pendidikan Dasardan Menengah*. Di akses pada 15 Januari 2019 <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/906CC3268C61C39C0D63>.
- Kompas. (2017) *Rapat Paripurna Hak Angket KPK Ricuh Sejumlah Anggota DPR Walk Out: Edisi Jum'at, 28 April 2017*. Diakses pada 05 Desember 2018. <https://nasional.kompas.com>News>Nasional>
- Majid. A. (2014). *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyono. (2012). *Strategi Pembelajaran*. Malang: UIN-MALIKI PRESS
- Rahayu, A.S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Simbolon. H. MR. (2014). *Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi Kelas dan Open Ended Question Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 2 Bengkulu*. Diakses pada 26 Januari 2019. [repository.unib.ac.id/8736/1/I%2CII%2CIII%2CII-14-her](http://repository.unib.ac.id/8736/1/I%2CII%2CIII%2CII-14-her)
- Sugiyono, (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suyahmo. (2015). *Model Implementasi Sila Ke-4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikamat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*. *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol. 32 No.1. Diakses pada 14 Agustus 2018. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPP/article/download/5707/4579>
- Yuwanto. (2016). *Parlemen dan Demokratisasi:Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 Nomor. 2 Maret 2016. Diakses pada 10 Januari 2019. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/2121/1352>